

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari situasi yang mengancam perempuan dan anak perempuan di Tigray, Ethiopia akibat konflik bersenjata yang pecah sejak November 2020. Konflik tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, terutama berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis gender yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan sebagai kelompok paling rentan. Tingginya angka kekerasan seksual, terbatasnya akses layanan kesehatan dan psikososial, serta lemahnya sistem perlindungan korban mendorong pentingnya respons dari organisasi internasional, termasuk UN Women. UN Women merupakan badan PBB yang bergerak dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara global. Dalam konteks Tigray, UN Women berupaya mendorong implementasi *Agenda Women, Peace, and Security* atau WPS yang berlandaskan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, bukan melalui mandat operasi keamanan langsung, tetapi melalui advokasi, penguatan kapasitas, kerja sama dengan aktor lokal, serta dorongan terhadap perlindungan dan pemulihan penyintas.

UN Women sebagai organisasi internasional telah mendorong implementasi *Women, Peace, and Security* dalam empat pilar utama, yaitu partisipasi, pencegahan, perlindungan, serta bantuan dan pemulihan. Pada pilar partisipasi, UN Women mendorong keterlibatan perempuan dan organisasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan WPS di Ethiopia melalui pengembangan *National Action Plan* WPS Ethiopia. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah Ethiopia,

Ministry of Women and Social Affairs, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil agar kebutuhan perempuan dalam konflik dapat masuk ke dalam kebijakan perdamaian dan keamanan nasional. UN Women juga mendukung masuknya lima organisasi masyarakat sipil nasional ke dalam komite teknis NAP UNSCR 1325 serta memberikan dukungan pendanaan kepada organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan tidak hanya dipahami sebagai kehadiran dalam negosiasi damai formal, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam advokasi, perumusan kebijakan, dan penguatan suara perempuan dalam proses pemulihan pascakonflik.

Pada pilar pencegahan, UN Women melakukan upaya untuk mencegah kekerasan seksual dan eksploitasi seksual dalam respons kemanusiaan melalui penguatan *Protection from Sexual Exploitation and Abuse* atau PSEA. Upaya tersebut dilakukan pada tahun 2021 di wilayah Tigray melalui pelatihan kepada 34 mitra kemanusiaan di Mekelle dan 17 aktor kemanusiaan di Shire, serta pendistribusian 40.300 materi informasi dan edukasi mengenai pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual. UN Women juga menjalankan pendekatan komunitas melalui organisasi berbasis agama, organisasi masyarakat sipil, media lokal, dan pendekatan (SASA!) untuk mengubah norma sosial yang masih membenarkan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Pada pilar perlindungan, UN Women memberikan dukungan terhadap *One Stop Centre* dan *shelter* di Mekelle melalui bantuan *dignity kits*, makanan, pakaian, dan bahan sanitasi bagi penyintas. UN Women juga mendukung layanan *shelter* dan *hotline*

konseling bagi penyintas kekerasan, serta pada tahun 2024 mendukung peluncuran *shelter* (GBV) di Axum, Tigray, bersama *Women Association of Tigray*. Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan dilakukan dengan cara menyediakan ruang aman, layanan dasar, konseling, dan jalur rujukan bagi penyintas kekerasan seksual.

Pada pilar bantuan dan pemulihan, implementasi WPS terlihat melalui dukungan terhadap ekosistem pemulihan penyintas yang mencakup layanan (GBV), *Women and Girls' Friendly Spaces*, *One Stop Centers*, *safe houses*, layanan psikososial, *dignity kits*, pelatihan ekonomi, serta *start-up kits* untuk reintegrasi sosial dan ekonomi. Meskipun beberapa program pemulihan dalam penelitian ini tidak seluruhnya merupakan program langsung UN Women, data tersebut tetap menunjukkan bahwa agenda (WPS) di Tigray berjalan melalui kerja sama lintas aktor antara pemerintah Ethiopia, lembaga PBB, organisasi internasional, dan organisasi lokal. Dalam praktiknya, pilar bantuan dan pemulihan menjadi pilar yang paling terlihat dari jumlah dan jangkauan layanan karena mencakup lebih dari satu juta penerima layanan (GBV), ratusan ribu penerima dukungan psikososial, serta ribuan penyintas yang memperoleh pelatihan ekonomi dan bantuan pemberdayaan. Namun, implementasi (WPS) oleh UN Women di Tigray masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan akses layanan, rusaknya fasilitas kesehatan akibat konflik, lemahnya akuntabilitas terhadap pelaku kekerasan seksual, serta belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam ruang perdamaian formal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya UN Women dalam mendorong implementasi WPS di Tigray telah berkontribusi penting dalam memperkuat advokasi, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan perempuan,

meskipun efektivitasnya masih perlu diperkuat agar lebih berdampak langsung bagi penyintas di lapangan.

4.2 Saran

Penelitian ini masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan dalam memperoleh data primer seperti wawancara langsung dengan pihak UN Women Ethiopia, mitra pelaksana di Tigray, maupun organisasi perempuan lokal yang terlibat dalam agenda *Women, Peace, and Security* (WPS). Kondisi tersebut membuat penulis lebih banyak bergantung pada data sekunder berupa laporan resmi, *policy brief*, *factsheet*, dan publikasi lembaga internasional untuk menjelaskan siapa aktor yang terlibat, apa bentuk program yang dijalankan, kapan program tersebut berlangsung, serta di mana implementasi agenda (WPS) dilaksanakan dalam periode 2020–2024 di Ethiopia, khususnya Tigray. Namun demikian, beberapa dokumen belum selalu memberikan penjelasan yang sama rinci mengenai bagaimana mekanisme program berlangsung di lapangan, mengapa terdapat pilar yang terlihat lebih dominan dibanding pilar lainnya, dan sejauh mana dampak program benar-benar dirasakan oleh para penyintas.

Selain itu, sebagian data mengenai bantuan dan pemulihan dalam penelitian ini juga berasal dari ekosistem respons yang melibatkan (UNFPA), (UNOPS), pemerintah Ethiopia, dan organisasi lokal, sehingga pembedaan antara kontribusi langsung UN Women dan kontribusi para mitra pelaksana masih belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara sangat spesifik.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbarui jangkauan penelitian setelah tahun 2024 karena situasi pascaperjanjian damai Pretoria dan implementasi *National Action Plan* (WPS) Ethiopia masih terus berkembang. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan wawancara dengan UN Women, pemerintah Ethiopia, lembaga PBB lain, dan organisasi perempuan lokal di Tigray agar dapat menjelaskan lebih jelas siapa aktor yang terlibat, apa program yang paling berdampak, kapan dan di mana program dilakukan, mengapa beberapa pilar belum optimal, serta bagaimana koordinasi antaraktor berlangsung. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan kerangka implementasi organisasi internasional agar kontribusi langsung UN Women dalam agenda (WPS) di Ethiopia dapat dibedakan secara lebih jelas dari kontribusi mitra lainnya.